



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALIMSYAH
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 740576

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.915.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 596 m2/230 m2 di KAB / KOTA ACEH
TENGGERA, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 790 m2/105 m2 di KAB / KOTA ACEH
TENGGERA, HASIL SENDIRI Rp. 335.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 264 m2/264 m2 di KAB / KOTA ACEH
BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 706 m2/706 m2 di KAB / KOTA ACEH
BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/114 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDA ACEH , Rp. 250.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 47 m2/47 m2 di KAB / KOTA ACEH
TENGGERA, Rp. 350.000.000
7. Tanah Seluas 45 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **185.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 180.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SOUL GT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **6.300.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.900.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.113.200.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.113.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.